



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PENJELASAN MENTERI PERINDUSTRIAN
TENTANG RKA-KL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
DALAM RAPAT KERJA DENGAN KOMISI VI DPR-RI**

TANGGAL, 1 SEPTEMBER 2015

Yth.:

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI;
2. Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI;

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Selamat Siang, dan Salam Sejahtera,

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan RKA-KL Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2016, Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKAKL Tahun 2016 berdasarkan program dan unit kerja serta bagaimana Kementerian Perindustrian mengamankan industri-industri kecil di daerah saat kurs dollar tinggi.

Kami sangat menghargai dan menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan tersebut.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat,

Berikut adalah jawaban kami atas 3 (tiga) pertanyaan yang disampaikan untuk Rapat Kerja pada hari ini.

Untuk pertanyaan **Pertama**, mengenai realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai dengan Agustus 2015 beserta kendala dan hambatannya serta upaya dan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2015, dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Kementerian Perindustrian s.d 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1,2 Triliun atau 26,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4,59 triliun. Namun realisasi secara fisik telah mencapai sekitar 36%.

Berkenaan dengan realisasi anggaran, Kementerian Perindustrian telah melakukan langkah-langkah strategis dan berkoordinasi dengan Unit/Satuan Kerja untuk meningkatkan percepatan penyerapan anggaran.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran, antara lain:

1. Adanya anggaran APBNP sebesar Rp. 4,593 Triliun yang turun pada bulan Mei yang sebagian besar kegiatannya masih dibintangi dan baru selesai proses buka blokirnya pada bulan Juli.
2. Kegiatan Revitalisasi Gula sebesar Rp.153,9 Miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena Pabrik Gula Penerima Bantuan sudah mendapat tambahan alokasi anggaran dari Kementerian BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 Ayat 5 (d) yang mengatur terkait belanja hibah dan bantuan sosial dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sementara itu calon penerima bantuan mesin dan peralatan sebagian besar belum berbadan hukum khususnya calon Wirausaha Baru, sehingga pemerintah daerah menolak hibah dari pemerintah pusat.
4. Beberapa kendala/hambatan pada kegiatan penumbuhan kawasan industri, antara lain:
 - a. Pembangunan Jalan Poros Halmahera Timur disebabkan oleh *basic plan design* yang dibuat tidak

- dilengkapi dengan data primer yang akurat sehingga perlu dilakukan pekerjaan perencanaan teknis (DED) terlebih dahulu.
- b. Pembebasan dan Pematangan Lahan di Palu dan Bitung tidak dapat dilakukan karena proses penyiapan dokumen menjadi dokumen Pengadaan Tanah sesuai dengan UU No.2/2012 memerlukan waktu kurang lebih 248 hari atau 8 bulan.
 - c. Pembangunan gedung, Peralatan Training Centre Building dan Sarana Sentra IKM di kawasan industri Halmahera Timur, Morowali, dan Konawe, yang tidak dapat direalisasikan karena adanya permasalahan terkait dengan tata ruang dan infrastruktur jaringan irigasi di dalam Kawasan Industri serta waktu konstruksi dan sumber daya yang tersedia tidak memungkinkan.
5. Belum diajukannya tagihan terhadap beberapa termin pembayaran yang sudah jatuh tempo oleh pihak ke-3.

Langkah-Langkah percepatan dalam realisasi anggaran, antara lain:

1. Mempercepat proses revisi anggaran dan pencairan tanda bintang.
2. Melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ULP.

3. Realokasi kegiatan revitalisasi gula sebesar Rp.153,9 Miliar untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan daya saing industri agro.
4. Melakukan revisi anggaran dari bantuan pengadaan bahan mesin peralatan kepada kegiatan peningkatan kemampuan SDM dan fasilitasi pembentukan badan hukum IKM binaan (koperasi).
5. Mengusulkan pemanfaatan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan prioritas lain sesuai dengan arah RPJMN 2015-2019.
6. Mendorong proses pembayaran uang muka atau penyelesaian pembayaran untuk termin yang sudah jatuh tempo untuk ditagihkan oleh pihak ketiga.
7. Mempercepat kegiatan-kegiatan swakelola

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat,

Untuk Pertanyaan **Kedua**, mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKAKL) Kementerian Perindustrian dalam menyikapi nilai kurs dollar yang terus melambung tinggi dan bagaimana Kementerian Perindustrian mengamankan industri-industri kecil di daerah, dapat disampaikan sebagai berikut.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian / Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga TA 2016, pagu anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2016 sebesar Rp. 3.339.228.559.000,- atau mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 576.907.459.000,- dari alokasi pagu awal sebesar Rp 3.916.136.018.000.

Dalam menyikapi nilai kurs dollar yang terus melambung tinggi, dilakukan langkah-langkah, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha melakukan substitusi bahan baku impor menjadi bahan baku berbasis lokal khususnya untuk industri berbahan baku impor dan pasar lokal.
2. Pemanfaatan hasil penelitian tentang penggunaan bahan baku alternatif berbasis lokal untuk menggantikan bahan baku impor.

Dalam mempertahankan eksistensi IKM di tengah kondisi perekonomian yang kurang mendukung dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
2. Bantuan dan bimbingan teknis dalam rangka mendorong penggunaan bahan baku lokal dan diversifikasi produk;

3. Pendampingan kepada IKM dalam rangka efisiensi proses produksi, akses informasi dan pemasaran;
4. Mendorong pemasaran produk-produk ekspor melalui kegiatan promosi dan pameran serta melalui pembukaan gerai di luar negeri.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat

Untuk Pertanyaan **Ketiga**, mengenai sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKAKL Tahun 2016 berdasarkan program dan unit kerja, dapat disampaikan sebagai berikut.

Sandingan pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015 dan RKAKL Tahun 2016 berdasarkan program dan unit kerja adalah:

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka tahun 2016 sebesar Rp 244,7 milyar atau turun sebesar 30,99% dari tahun 2015 yang sebesar 354,57 milyar;
2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro tahun 2016 sebesar Rp 215,76 milyar atau turun sebesar 39,19% dari tahun 2015 yang sebesar 354,79 milyar;
3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan tahun 2016 sebesar Rp 200,85 milyar atau turun sebesar 45,58% dari tahun 2015 yang sebesar 369,04 milyar;

4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tahun 2016 sebesar Rp 432,87 milyar atau turun sebesar 30,51% dari tahun 2015 yang sebesar 622,94 milyar;
5. Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri tahun 2016 sebesar Rp 540,49 milyar atau turun sebesar 49,58% dari tahun 2015 yang sebesar 1,07 triliun;
6. Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional tahun 2016 sebesar Rp 50,26 milyar atau naik sebesar 0,8% dari tahun 2015 yang sebesar 49,86 milyar;
7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri tahun 2016 sebesar Rp 570,88 milyar atau naik sebesar 1,21% dari tahun 2015 yang sebesar 564,03 milyar;
8. Program Peningkatan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2016 sebesar Rp 49,57 milyar atau naik sebesar 7,34% dari tahun 2015 yang sebesar 46,18 milyar;
9. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian tahun 2016 sebesar Rp 1,02 triliun atau turun sebesar 7,01% dari tahun 2015 yang sebesar 1,09 triliun;
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2016 sebesar Rp 15,92 milyar atau turun sebesar 21,58% dari tahun 2015 yang sebesar 20,3 milyar.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat,

Demikianlah penjelasan kami pada Rapat Kerja hari ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

SALEH HUSIN